

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA FOKUS DI DESA EMPIRANG UJUNG KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

*Implementation of Focus Village Program Policy in Empirang Ujung Village
Balai Subdistrict - Sanggau Regency*

Paulina¹, Netty Herawati², Sukamto³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran di Desa Empirang Ujung Kecamatan Balai masih belum maksimal karena kurang konsistennya implementor untuk melaksanakan program sesuai perencanaan. Terbatasnya sumber daya dari segi keuangan menyebabkan program yang dilaksanakan menjadi terbatas dan belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sanggau hanya bisa melaksanakan program dengan memaksimalkan kondisi keuangan yang tersedia. Selain itu masih rendahnya kesadaran implementor untuk berkomitmen melaksanakan program desa fokus ini juga menyebabkan tidak semua program yang direncanakan dapat terlaksana. Struktur Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai dari Persiapan dan perencanaan, Pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi, pelaporan hasil pencapaian sampai dengan tahap pematangan. Struktur birokrasi yang jelas membuat kelompok sasaran memahami dan merespon positif program desa fokus tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Desa Fokus.

¹ PNS Kabupaten Sanggau

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Sanggau memiliki tantangan yang spesifik didalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah kesenjangan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Sanggau disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sanggau saat ini. Oleh karena itu, sejak tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mencanangkan suatu program dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program tersebut dikenal dengan program Desa Fokus sebagai salah satu amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Program desa fokus adalah suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Desa fokus merupakan program bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka membangun desa secara lebih terpadu, terarah, terkoordinasi dan bersinergi. Berkenaan dengan hal itu, maka mulai tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan kebijakan dan program pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan melalui pembiayaan APBD (dan sumber lainnya) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Sanggau. Usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda serta akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas didesa dalam rangka melaksanakan program masing-masing.

Kegiatan program desa fokus Kabupaten Sanggau dilakukan dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terpadu dari berbagai sektor terkait. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut, dibentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Program Desa Fokus. Strategi pembangunan desa fokus yang digunakan adalah model teori obor nyamuk, yaitu bermula dari pinggir menuju sentral. Dengan logika bahwa desa maju maka kecamatan maju, kecamatan maju maka kabupaten secara keseluruhan akan maju. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sudah memasuki tahun ketiga sejak dicanangkan pada Tahun 2009 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau Tahun 2010 dengan jumlah 18 Desa Fokus, dan untuk Tahun 2011 ada penambahan jumlah Desa Fokus sebanyak 25 desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 235 Tahun 2010. Tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 650 Tahun 2011 terdapat penambahan 29 desa fokus. Jumlah Desa Fokus di Kabupaten Sanggau sampai dengan 2012 sudah berjumlah 72 Desa dan akan dilanjutkan ditahun 2013 dengan jumlah yang direncanakan juga bertambah.

Pelaksanaan kebijakan Program Desa Fokus secara umum dilatar belakangi oleh minimnya pembangunan dan pemberdayaan serta dominasi fenomena kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, kurangnya kesempatan berusaha, sampai menyangkut aspek sosial dan moral masyarakat. Salah satunya adalah minimnya akses mobilitas masyarakat yaitu infrastruktur fisik berupa jalan, yang berimbas pada kurangnya kesempatan usaha bagi masyarakat. Terbatasnya akses masyarakat tidak dapat dipungkiri membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Desa Empirang Ujung, jalan merupakan akses utama dalam mendistribusikan hasil pertanian bagi masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur di Desa Empirang Ujung merupakan program yang sangat tepat dalam mendukung tercapainya tujuan Program Desa Fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Sebagai sebuah kebijakan, berbagai program melalui kebijakan tersebut tentu diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan kedepannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat desa dan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Namun dari hasil observasi awal, secara fisik Desa Empirang Ujung dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang belum sepenuhnya terjamin oleh adanya Kebijakan Program Desa Fokus, terutama jika diamati dari segi infrastruktur jalan. Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Desa Empirang Ujung adalah jalan tanah yang pada saat musim hujan kondisinya sangat licin dan menghambat akses masyarakat menuju ke luar atau pun masuk ke desa. Selain itu, desa Empirang Ujung yang terdiri dari 6 Dusun dan 12 RT hanya memiliki 2 Fasilitas kesehatan dan 2 Fasilitas Pendidikan yang bisa diterima oleh masyarakat. Berdasarkan paparan diatas penulis menduga ada permasalahan dalam implementasi desa fokus di Desa Empirang Ujung ini yang belum optimal jika melihat kesenjangan antara program yang direncanakan dibandingkan dengan pelaksanaan program. Penulis tertarik untuk meneliti implementasi desa fokus di desa Empirang Ujung ini sesuai dengan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edward 3 yaitu dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi selama proses pelaksanaan desa fokus di Desa Empirang Ujung.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Proses implementasi kebijakan Program desa fokus di Desa Empirang Ujung Kabupaten Sanggau
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Program Desa Fokus di desa Empirang Ujung Kabupaten Sanggau?

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi kebijakan Program Desa Fokus di Desa Empirang Ujung, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan

Beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli sebagai berikut :

- a) James E. Anderson dalam Luankali (2007:182), kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu.
- b) Carl Friedrich dalam Luankali (2007:183), kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- c) Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- d) Woll dalam Tangkilisan (2003:2) “kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan

dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

2. Kebijakan Publik

Terdapat banyak batasan dan definisi yang bisa didapatkan dari literatur ilmu politik maupun administrasi tentang kebijakan publik. Namun banyaknya pendapat tersebut tidaklah berarti telah memberikan makna yang simpang siur atau pertentangan persepsi tentang kebijakan publik. Perbedaan justru terjadi hanya pada kedalaman analisis didalam merumuskan batasan kebijakan publik itu sendiri. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diantaranya :

- a) Friedrick dalam Dwidjowijoto (2003:4) mengartikannya kebijakan publik serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- b) Dwidjowijoto (2003:57) Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu "kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis, dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi.
- c) Easton dalam Wahab (2002: 9) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa, kebijakan tersebut dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dalam sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab berkaitan dengan keputusan atau kebijakan publik tertentu.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat (*public Interest*).

3. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2004 :64) menyatakan bahwa, konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Beberapa pengertian implementasi yang dikemukakan para ahli diantaranya:

- a) Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:65) menyatakan bahwa, implementasi adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".
- b) Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk

pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa, implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan sering ditemukan betapapun baiknya formulasi kebijakan yang telah dibuat tidak akan berguna apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Menpelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Kegiatan ini terletak antara formulasi/perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Beberapa pengertian dan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli diantaranya :

- a) Grindle (1980:7) menyatakan bahwa, implementasi merupakan proses untuk tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
- b) Van Mater dan Van Horn dalam Luankali (2007:83) mendefinisikan implementasi sebagai proses yaitu proses implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapaian tujuan-tujuan yang telah dipikirkan dalam keputusan kebijakan.
- c) Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006: 139) menjelaskan bahwa, pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.
- d) Randal Ripley (1987:48-49) menyatakan bahwa, tahap implemementasi dipandang sebagai aktivitas fungsional yang menindaklanjuti *output* dari aktivitas fungsional yang mendahuluinya yakni aktivitas formulasi dan legitimasi kebijakan. Produk dari aktivitas ini adalah berupa pernyataan tentang kebijakan (*policy statements*) yang biasanya berisi tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai dan rancangan program untuk mencapainya. Aktivitas yang disebut implemementasi kebijakan, tidak lain adalah aktivitas fungsional untuk melaksanakan rancangan program itu (*program implementation*) ke dalam kegiatan-kegiatan administratif (*administrative action*) yang nyata seperti pendanaan, perencanaan, pengorganisasian. *Output* dari aktivitas

implementasi program ini berupa *process* atau *policy action* yang pada gilirannya akan membimbing ke arah pencapaian tujuan kebijakan dan program.

- e) Edward III dalam Juliartha (2009 : 58) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok yakni : (i) faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa saja yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.
- f) Indiahono (2009:144) pendekatan implementasi kebijakan yang terkenal adalah pendekatan *command* (kepatuhan) atau disebut juga pendekatan *top down*, merupakan kepatuhan implementor terhadap sektor administrasi kebijakan. Pendekatan kedua adalah *what happen* atau pendekatan *bottom up*. Pendekatan yang menginginkan pengungkapan kejadian-kejadian di ranah implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka, demi terjadinya reformulasi kebijakan berdasarkan informasi di lapangan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, pada penelitian program desa fokus, penulis mendasarkan pada konsep implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Implementasi kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4. Pembangunan Pedesaan

Beberapa pengertian dan konsep yang menjelaskan tentang pembangunan pedesaan diantaranya sebagai berikut :

- a) Mutawali dalam Mulyadi (2009:59) mendefinisikan pembangunan masyarakat desa sebagai “seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.”
- b) Surjadi dalam Mulyadi (2009:59) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan pada inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak muncul, maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorong agar inisiatif itu keluar.
- c) Wiryoemarto dalam Mulyadi (2009:58) mendefinisikan bahwa, pembangunan masyarakat desa adalah istilah yang dipakai guna menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk mendekati masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan inisiatif dan kekuatan lokal yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi dan standar hidup yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa pengertian pembangunan masyarakat desa diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu di pedesaan yang dilakukan atas inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan produksi dan standar kehidupan yang lebih baik.

5. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum pengembangan desa minimal mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maupun nasional.

Menurut Beratha (1982:86) Perencanaan pembangunan desa sangat penting dari aparat perencanaan di desa karena :

- a) Dengan perencanaan yang terarah memungkinkan pimpinan (kepala desa) secara sadar memusatkan segala kegiatan desa dan masyarakatnya untuk mencapai tujuan-tujuan daripada pembangunan desa.
- b) Perencanaan cenderung mendorong kearah tercapainya efisiensi.
- c) Didalam perencanaan harus pula diperhitungkan sifat ketidakpastian serta sifat mudah berubah dari keadaan yang akan datang. Maka dengan perencanaan kepala desa dapat mengirakan perubahan yang mungkin timbul.
- d) Dengan perencanaan yang terarah akan memaksa kepala desa untuk mempunyai gambaran yang menyeluruh dari berbagai faktor penting dan karenanya memberikan perhatian kepada setiap aspek di dalam proses perencanaan tersebut.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi kata pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, berdaya yang artinya ber tenaga atau berkemampuan. Suharto (2003:213) mengemukakan bahwa, mendayagunakan adalah memanfaatkan tenaga yang ada semaksimal mungkin dan mengusahakan dengan waktu terbatas hasil kerja yang diperoleh melebihi hasil rata-rata atau hasil yang biasanya, sedangkan pendayagunaan mendukung arti pemanfaatan tenaga, waktu dan hal-hal lain sehemat dan sebaik mungkin. Menurut Sumaryadi (2005:111) pemberdayaan masyarakat merupakan, upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah menampunkan dan memandirikan masyarakat.

Terry Wilson dalam Sumaryadi (2005:97) mengemukakan konsep pemberdayaan digambarkan dalam tiga tahapan yaitu tahapan politis, organisasi dan individu :

- a. pada tingkat politik, pemberdayaan merupakan mekanisme bantuan diri bagi orang lain (*mechanism of self-help for people*).
- b. pada tingkat organisasi, pemberdayaan merupakan daya tarik bagi organisasi daripada teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang.
- c. pada tingkat individu, individu-individu mengubah kehidupan mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak mungkin. Namun, proses pemberdayaan pada tiap individu berbeda hasilnya.

Untuk menumbuhkan partisipasi diperlukan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian partisipasi membutuhkan pemberdayaan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) untuk mengobati masalah-masalah psikologis seperti halnya ketidakberdayaan (*sense of powerness*), tidak percaya diri, dan merasa bahwa mereka bukan bagian dari agen perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Empirang Ujung Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik bertujuan (*purposive*) yang terdiri dari Wakil Bupati Sanggau, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Penataan Kelurahan Kabupaten Sanggau, Camat Balai, Kepala Desa Empirang Ujung serta masyarakat Desa Empirang Ujung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat

pedoman observasi, panduan wawancara dan alat-alat elektronik berupa kamera foto dan *tape recorder*. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori suatu uraian dasar, sehingga dari analisis dapat diketahui dan ditemukan tema-tema tertentu yang dapat dijadikan teori substantif.

HASIL PENELITIAN

A. Program Desa Fokus Di Desa Empirang Ujung

Program desa fokus merupakan program khas dari Kabupaten Sanggau, disamping program desa siaga yang dikeluarkan pemerintah pusat dan program *Mamangun dan Mahaga Lewu* yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Model pembangunan desa fokus diharapkan dapat meminimalkan jumlah desa tertinggal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2014). Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui APBD Propinsi, APBD kabupaten dan APBN yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program desa fokus, yaitu program pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (sarana air bersih, jalan, jembatan, dan lingkungan), program pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa, program peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan (sunatan massal, imunisasi, posyandu) dan program pemberdayaan pemerintah desa (fasilitasi pendataan profil desa, penataan administrasi desa, pelaksanaan musrenbangdes dan lain-lain).

Usulan terhadap masing-masing desa fokus setiap tahunnya diusulkan oleh Camat yang nantinya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Fransiscus Marinus, MM selaku Camat Balai, beliau mengatakan "Kita sebagai fasilitator mengusulkan saja nama-nama desa yang tergolong dalam kriteria desa tertinggal untuk diusulkan kepada Bupati melalui BPPemdes".

a. Tujuan Program Desa Fokus

Secara umum tujuan dari program desa fokus adalah untuk mewujudkan desa percontohan yang mana masyarakatnya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memicu pertumbuhan desa. Secara rinci tujuan yaitu :

- a. Mengkondisikan masyarakat dalam gerak pembangunan desa.
- b. Menguatkan dan mengembangkan masyarakat desa.
- c. Mendayagunakan penggerak pembangunan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan oleh para SKPD terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di desa fokus.

b. Sasaran Program Desa Fokus

Sasaran umum program ini menurunkan jumlah desa tertinggal. Sasaran pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan, meliputi:

- a. Pemerintahan Desa, yang berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan, memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.
- b. Lembaga Kemasyarakatan/Badan Perwakilan Desa, yang berperan dalam menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat.
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat tersedianya kader pemberdayaan masyarakat yang berkualitas.
- d. Masyarakat, yang berperan dalam pembangunan desa.
- e. Kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun non fisik seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, perekonomian, penerangan, jalan dan jembatan serta kebutuhan air bersih, serta kebutuhan lainnya.

c. Prinsip Pelaksanaan dan Kegiatan

1) Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan, meliputi :

- a. Mudah diterima dan didayagunakan serta merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat desa.
- b. Memberikan manfaat yang memadai serta mendidik masyarakat desa untuk mandiri.
- c. Hasil pembangunan dapat dilestarikan oleh masyarakat desa sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi masyarakat desa setempat.
- d. Program dan kegiatan pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan yang arahkan kedesa berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin serta secara bertahap dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada pada desa setempat.
- e. Setiap tahapan kegiatan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat serta dimonitoring dan dievaluasi oleh SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut.

2) Kegiatan Pokok

Serangkaian kegiatan pokok pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD, baik kegiatan fisik maupun non fisik, meliputi:

- a. Pembangunan sistem manajemen pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan.
- b. Melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia.
- c. Pembangunan perekonomian masyarakat desa.
- d. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- g. Dan lain-lain pembangunan fisik dan non fisik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa

3) Kriteria Pemilihan Desa Terpencil

Kriteria desa sasaran yang dimaksud dalam program desa fokus ini adalah kategori desa-desa tertinggal, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat dimasa mendatang. Adapun kriteria penetapan desa fokus yaitu:

- 1) Memiliki potensi dan sumberdaya unggulan sesuai dengan karakteristiknya yang dapat dikembangkan dan tertuang dalam profil desa.
- 2) Lembaga pemerintahan (pemerintahan desa dan BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPM) berperan secara optimal.
- 3) Keberadaan lembaga perekonomian (BUMDes, Pasar Desa, lembaga Keuangan Mikro dan atau Usaha Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, Kelompok usaha Kecil Menengah, Lumbung Pangan Masyarakat Desa) cukup berperan.
- 4) Memiliki jumlah rumah tangga miskin cukup besar dibandingkan beberapa desa lainnya.
- 5) Masyarakat desa memiliki kemauan dan komitmen untuk dikembangkan dan atau membangun keswadayaan masyarakat secara mandiri.
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

4) Pengorganisasian Program Desa Fokus

Pemantapan pelaksanaan program desa fokus di kabupaten Sanggau perlu ditingkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas pelaku dan melibatkan banyak pihak terkait pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan sehingga menjadi satu kegiatan terpadu. Pengorganisasian diimplementasikan dalam bentuk tim koordinasi pelaksana program yang pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan wewenang dan tanggung jawab yang sama dari masing-masing individu untuk mengerjakan suatu aktivitas.

5) Tim Koordinasi Kabupaten

Di tingkat kabupaten dibentuk tim koordinasi Program desa fokus dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi.

Tim pelaksana kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang difokuskan ke desa binaan.
- b. Menetapkan pedoman pelaksana fasilitasi pembangunan desa binaan/desa fokus.
- c. Menginventarisir potensi sumberdaya yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat desa binaan/desa fokus.
- d. Menginventarisir dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di desa binaan/desa fokus.
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara komprehensif di desa binaan/desa fokus.
- f. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan SKPD ke desa binaan/desa fokus.
- g. Melakukan analisis kondisi desa dan menyusun profil desa sebagai bahan menyusun rencana kegiatan SKPD.
- h. Melakukan sosialisasi ke desa binaan tentang program dan kegiatan yang diarahkan oleh SKPD ke desa binaan/desa fokus.
- i. Menyampaikan laporan kepada Bupati/Wakil bupati atas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tim pelaksana pemberdayaan desa binaan/desa fokus berikut penulis sajikan data SKPD terkait pelaksanaan program desa fokus.

6) Tim Koordinasi Kecamatan

Tim Koordinasi program desa fokus di tingkat kecamatan dibentuk dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tim pelaksana Kecamatan/ Desa

- a. Camat mengkoordinasikan unit kerja yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa binaan/desa fokus.
- b. Membina kader pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa binaan/desa fokus.
- c. Memantau, mengendalikan, dan membina serta melaporkan pelaksanaan pembangunan di desa binaan yang ada di wilayahnya.
- d. Kepala desa bersama BPD memfasilitasi SKPD dalam melaksanakan teknis kegiatan lapangan.
- e. Kepala desa memimpin dan mengkoordinasikan pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan di desa binaan/desa fokus.
- f. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan peraturan desa dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan desa binaan/desa fokus.
- g. Kepala desa, BPD dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) menggerakkan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan desa binaan/desa fokus.

7) Pengelolaan Program Desa Fokus

Pengelolaan program desa fokus meliputi kegiatan pokok yaitu mekanisme pelaksanaan program desa fokus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan dan perencanaan

- a. Penetapan surat keputusan tim koordinasi tim pelaksana.
- b. Penetapan desa lokasi program desa fokus.
- c. pendataan dan analisis profil/potensi desa sasaran program desa fokus untuk merumuskan permasalahan dari prioritas
- d. Inventarisasi seluruh (program/kegiatan yang ada dengan melihat dokumen perencanaan tiap-tiap SKPD.
- e. Meninjau alokasi sumberdaya (program/kegiatan dan pendanaan) jika diperlukan.

- f. Rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk penyusunan rencana kegiatan tahunan program desa fokus.
- g. Rapat koordinasi dengan kecamatan untuk sinkronisasi kegiatan dalam rencana aksi tahunan program desa fokus.
2. Pelaksanaan
Terdapat 24 SKPD yang secara bersama-sama melakukan pembangunan di Desa Empirang Ujung. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan prasarana seperti jalan, sarana air bersih, peningkatan akses masyarakat, terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Monitoring dan Evaluasi
Agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan, sasaran dan mekanisme yang telah ditetapkan maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme yang berlaku dari tiap SKPD. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan input program sesuai rencana, memastikan keluaran desa fokus berkelanjutan sesuai rencana, mengukur kualitas dan kuantitas hasil pembangunan serta manfaat bagi masyarakat, sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil tujuan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan melalui evaluasi tahunan melalui rapat koordinasi.
4. Laporan hasil pencapaian
Laporan dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program secara berjenjang setiap tiga bulannya. Pelaporan dilakukan secara berkelanjutan dilakukan oleh:
 - a. Kepala desa kepada camat ;
 - b. Camat kepada Bupati/ Wakil Bupati dan menembuskannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMDes) Kabupaten Sanggau;
 - c. Kepala SKPD kepada Bupati/ Wakil Bupati;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati/ Wakil Bupati.
5. Pendanaan
Sumbangan pendanaan berasal dari : APBN / APBD Provinsi ; APBD Kabupaten ; APBDDes ; Swadaya masyarakat, swasta, dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
6. Pemanfaatan
Pemanfaatan peran pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan tim pelaksana program desa fokus serta dukungan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan aset aset dan program di daerah sehingga secara berkelanjutan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Empirang Ujung.

Program Desa Fokus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sudah memasuki tahun keempat sejak dicanangkan pada Tahun 2009 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau Tahun 2010 dengan jumlah 18 Desa Fokus, dan untuk Tahun 2011 ada penambahan jumlah Desa Fokus sebanyak 25 desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 235 Tahun 2010. Tahun 2011 dengan jumlah 25 Desa Fokus dan sampai tahun 2013 jumlah Desa Fokus di Kabupaten Sanggau sudah berjumlah 72 Desa dan akan dilanjutkan ditahun 2013 dengan jumlah yang direncanakan juga bertambah.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus Di Desa Empirang Ujung

1. Komunikasi

Implementasi Program Desa Fokus di Desa Empirang Ujung, selayaknya kebijakan lain yang sudah tentu melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Dalam program desa fokus setiap SKPD diberi tanggung jawab sebagai koordinator pada masing-masing desa. Tugasnya adalah mengkoordinasikan berbagai hal dan kegiatan yang dilaksanakan dengan SKPD lainnya. Untuk koordinasi secara umum dilakukan kepada BPMPEMdesa sedangkan untuk koordinasi terakhir berada dalam pengawasan Bupati Sanggau. Pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat beserta desa dan perangkat desa lainnya. Khusus di Desa Empirang Ujung, pada tahun 2012 SKPD koordinator adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BP2KBPA).

Komunikasi antar organisasi yang dimaksud pada pelaksanaan Program Desa fokus yang melibatkan pemerintah kabupaten dalam hal ini tim pelaksana dari semua SKPD, Pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa selaku implementor dapat dilihat dari adanya tahap evaluasi mengenai kebijakan Program Desa Fokus di Desa Empirang Ujung, yang dapat dilihat dari adanya buku Laporan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahkan ke Desa Fokus/Binaan Bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2012, dan adanya kunjungan Wakil Bupati Sanggau ke Desa Empirang Ujung untuk meninjau pelaksanaan program, serta kegiatan lain terkait dengan pembangunan desa juga yaitu kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang pada tahun 2012 memang dirusatkan di Desa Empirang Ujung, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kepala Desa Empirang Ujung kepada peneliti. Menurut keterangan staf kantor desa, meskipun demikian pada saat pelaksanaan program tidak dapat ditutupi kemungkinan bahwa memang pernah terjadi kesalahan yang diakibatkan kurangnya komunikasi, khususnya dari pemerintah selaku implementor kunci kepada masyarakat selaku sasaran program. Ukuran dari faktor ini juga dapat dilihat dari lemahnya koordinasi antar sesama implementor maupun antara implementor dengan pihak yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga jelas bahwa faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap baik atau buruknya kinerja suatu kebijakan.

Kurangnya komunikasi ini dilihat dari kenyataan bahwa, ternyata kerap kali SKPD yang turun ke desa hanya bertemu dengan perangkat desa saja. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi yang jelas antara pihak implementor dengan aparat desa maupun masyarakat. Pihak pemerintah dalam hal ini SKPD yang turun ke desa meskipun sudah terjadwal sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kenyataan di desa bahwa masyarakat di Desa Empirang Ujung tersebar di 6 dusun serta 12 RT, sebagian besar melakukan aktifitas di luar rumah seperti berani sehingga menjadi masalah apabila ingin mengumpulkan masyarakat apabila ada kunjungan dan sosialisasi dari SKPD kabupaten yang berkunjung ke desa. Meski demikian, dalam hal ini, peneliti sepenuhnya memahami bahwa dalam merumuskan kebijakan bukanlah perkara mudah, mengingat banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang terlibat dalam setiap perumusan kebijakan. Namun dalam perumusan kebijakan selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk lebih konsisten dalam setiap penyelenggaraan program, sehingga dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program.

2. Sumber Daya

Sumberdaya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program desa fokus di Desa Empirang Ujung didukung oleh seluruh SKPD, sebab program desa fokus merupakan usaha pembangunan dalam banyak aspek sehingga dirangai oleh masing-masing instansi yang meliputi pemerintah kabupaten, kecamatan, sektor swasta, kepala desa dan seluruh perangkat desa. Pemerintah memang merencanakan program desa fokus ini agar dapat melibatkan seluruh aparatur pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk dapat melihat kondisi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Diperoleh keterangan bahwa, sumber daya yang dilibatkan tentunya kita mengerahkan seluruh pihak yang terkait khususnya para kepala SKPD untuk terlibat langsung di desa fokus. Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap SKPD diwajibkan untuk melakukan kegiatan pendampingan. Untuk

desa sendiri kita *link*-an kepala desa dan seluruh perangkat desa mendorong masyarakat desa untuk ikut terlibat.

Secara finansial pendanaan Program desa fokus di Desa Empirang Ujung dilakukan oleh masing-masing SKPD yang terlibat sesuai dengan anggarannya masing-masing untuk dilaksanakan di desa yang tergolong dalam desa fokus. Setiap SKPD akan turun ke desa untuk melaksanakan program kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD yang bersangkutan. Anggaran untuk desa fokus tidak dibebankan kepada salah satu instansi tertentu saja, tetapi semua SKPD yang terlibat. Jadi SKPD yang memiliki program khusus di desa melaksanakan program yang telah direncanakan di desa fokus yang ditentukan sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. Pelaksana di tingkat kabupaten dibawah koordinasi BPMDes tapi kalau pelaksana kegiatan tiap SKPD diwajibkan untuk melakukan kegiatan pendampingan. Program desa fokus ini merupakan program keroyongan dari SKPD. Sehingga setiap SKPD harus berperan aktif, berdasarkan anggaran yang telah disiapkan. Ketersediaan sumber daya ternyata masih menjadi kendala yang cukup sulit dalam implementasi kebijakan Program Desa Fokus, khususnya di Desa Empirang Ujung. Pihak pemerintah sendiri mengakui bahwa tahap implementasi kebijakan Program Desa fokus masih terkendala oleh masalah sumberdaya, terutama pada masalah pendanaan atau dari sisi finansial. Terbatasnya anggaran yang tersedia terpaksa membuat setiap langkah dalam melaksanakan pembangunan di desa menjadi terbatas. Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya memanfaatkan dana yang tersedia untuk melakukan pembangunan secara maksimal. Padahal masyarakat Desa Empirang Ujung sesungguhnya mengharapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai aspek kehidupan yang sekiranya dapat memberikan dampak dan manfaat.

Implementasi kebijakan Program Desa Fokus ternyata tidak ada pendanaan khusus sehingga pengerjaan program senyatanya belum cukup maksimal. Program-program yang dilaksanakan di Desa Empirang Ujung bersumber dari APBN, APBD, DAK dan DAU yang tersedia.

4. Disposisi

Berkaitan dengan faktor disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, dalam implementasi kebijakan Program Desa Fokus di desa Empirang Ujung, masalah yang berhubungan dengan faktor tersebut ditunjukkan terlihat dari kurang konsistennya implementor khususnya tim pelaksana untuk melaksanakan programnya di desa Empirang Ujung. Masih ada aparatur pemerintah dan SKPD tertentu yang tidak melaksanakan programnya sebagaimana perencanaan awal desa fokus ini. Diketahui bahwa, masih ada para birokrat yang mengeksklusifkan diri dengan tidak mau berkunjung ke desa. Kecenderungan untuk bekerja hanya dibelakang meja tanpa melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Padahal program desa fokus ini memang dirancang supaya semua pihak dapat terlibat langsung di desa-desa. Pola pikir yang demikian yang seharusnya bisa diubah untuk memajukan seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Tercatat dari data realisasi kegiatan SKPD yang diarahkan di Desa Empirang Ujung bahwa yang tidak melaksanakan program kerjanya adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (PMPP). Padahal kegiatan yang diarahkan melalui SKPD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu sosialisasi visi dan misi Kantor PMPP, pendataan pelaku usaha kecil dan menengah, serta informasi pelayanan perizinan. Kegiatan ini sangat disayangkan tidak dapat terlaksana di Desa Empirang Ujung padahal sesungguhnya masyarakat membutuhkan informasi tersebut untuk mengembangkan usaha mereka. Seperti halnya pemberian merk dagang dan perizinan untuk penjualan Lempok Durian dan Gula Aren. Sebagaimana diketahui Kecamatan Balai dikenal sebagai penghasil durian dan gula aren terbanyak. Namun sampai saat ini masyarakat Desa Empirang Ujung belum dapat mengelola masalah pemasaran terhadap produk yang mereka hasilkan secara alami dan dibuat dalam skala usaha kecil ini. Peran pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar dapat mengarahkan produk-produk unggulan ini sehingga memiliki nilai jual yang tinggi

bagi konsumen dimanapun bukan hanya untuk kawasan Kalimantan Barat, tetapi dapat dipasarkan di daerah lain seperti pulau Jawa, Sumatra dan sebagainya.

Masyarakat Desa Empirang Ujung juga menilai bahwa, program desa fokus yang dilaksanakan di Desa Empirang Ujung merupakan bentuk murni dari pemikiran kepala daerah untuk membantu masyarakat. Program desa fokus ini memberikan kesempatan kepada masyarakat desa supaya lebih berkembang dan mandiri melalui sedikit bantuan yang diberikan pemerintah. Desa yang dahulu dipandang sebagai tempat yang terkesan terbelakang, kini mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri melalui rintisan program desa fokus. Program desa fokus yang dilaksanakan di Desa Empirang Ujung dinilai bukan merupakan strategi kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi memang murni dari pemikiran kepala daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan mengingat jumlah desa dan luas wilayah serta APBD Kabupaten Sanggau yang tidak mencukupi jika melakukan pembangunan secara menyeluruh pada 163 desa yang terdapat di Kabupaten Sanggau.

4. Struktur Birokrasi

Program desa fokus di Desa Empirang Ujung Kabupaten Sanggau dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan fasilitasi pemberdayaan desa fokus yang telah dibentuk oleh Bupati. Tim ini yang nantinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua program pembangunan di desa fokus. Namun tim SKPD yang dibentuk juga memerlukan daya tangkas dari kelompok sasaran (*target group*). Program ini tidak bisa berjalan sempurna apabila target group tidak mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, program ini juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat penerima program.

Program desa fokus di Desa Empirang Ujung sudah tersusun sedemikian rupa mulai dari tahap persiapan yaitu penetapan surat keputusan dan pemilihan lokasi desa fokus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tim SKPD kabupaten kemudian melakukan rapat pembahasan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di desa fokus. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dimana tim fasilitasi dari SKPD Kabupaten Sanggau yang secara bersama-sama melakukan pembangunan di Desa Empirang Ujung. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan prasarana seperti jalan, sarana air bersih, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selama melaksanakan program juga dilakukan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan input program sesuai rencana, memastikan keluaran desa fokus berkelanjutan sesuai rencana, mengukur kualitas dan kuantitas hasil pembangunan serta manfaat bagi masyarakat, sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil tujuan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan melalui evaluasi tahunan melalui rapat koordinasi. Kemudian diadakan laporan hasil pencapaian untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program secara berjenjang setiap tiga bulannya. Program ini masih dipantau dengan tahap pemantauan dimana peran pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan tim pelaksana program desa fokus serta dukungan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan aset-aset dan program di daerah sehingga secara berkelanjutan dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Empirang Ujung.

Program desa fokus ini juga dapat berjalan baik apabila aparatur desa memiliki kemampuan untuk menerima dan menerapkan setiap program yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten. Peran aparat desa sangat penting sebagai ujung tombak tim fasilitasi SKPD kabupaten agar dapat mengkondisikan masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam setiap program pembangunan yang diberikan.

Struktur birokrasi yang jelas dan terencana tidak menyulitkan dan membuat kaget masyarakat di Desa Empirang Ujung. Hal ini dapat dilihat dengan tanggapan masyarakat yang begitu antusias mengikuti berbagai kegiatan PKK, sosialisasi, bergotong-royong membangun gedung pertemuan desa dan sarana MCK yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari pula. Pada dasarnya masyarakat sangat senang dan bangga

jika pemda selaku pendamping mereka, serta memberikan bantuan kepada masyarakat. Apalagi ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, seperti kebersihan lingkungan, posyandu, kemudian kegiatan dari pemerintah yang mengundang masyarakat seperti sosialisasi, pertemuan, dan sunatan massal. Dari dinas pendidikan seperti bantuan pendidikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Program Desa fokus di Desa Empirang Ujung melibatkan pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu tim pelaksana dari semua SKPD, Pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa selaku implementor. Sasaran dari program desa fokus ini adalah pemerintah desa, BPD, Masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan karena lemahnya koordinasi antar sesama implementor, maupun antara implementor dengan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kurangnya komunikasi dilinat dari kenyataan kunjungan SKPD yang melaksanakan program desa fokus seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga hanya bertemu dengan aparat desa dan tidak bertemu dengan masyarakat.
2. Sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program desa fokus di Desa Empirang Ujung didukung oleh seluruh SKPD, hal ini dikarenakan program desa fokus merupakan usaha pembangunan dalam banyak aspek sehingga melibatkan masing-masing instansi yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, sektor swasta, kepala desa dan seluruh perangkat desa. Sedangkan Sumber pendanaan program desa fokus yang dilaksanakan di Desa Empirang Ujung bersumber dari APBN, APBD, DAK dan DAJ. Dalam pelaksanaannya ketersediaan keuangan menjadi kendala yang menyebabkan pelaksanaan program desa fokus di Desa Empirang Ujung menjadi belum maksimal hanya terbatas pada anggaran yang tersedia sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
3. Disposisi pelaksanaan kebijakan program desa fokus di Desa Empirang Ujung ternyata belum sesuai dengan perencanaan awal desa fokus tersebut. Masih terdapat implementor yang kurang konsisten khususnya tim pelaksana untuk melaksanakan programnya di desa Empirang Ujung sesuai dengan surat keputusan Bupati Sanggau yang telah dibuat. SKPD tersebut yaitu : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan , Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
4. Struktur Birokrasi Pelaksanaan kebijakan program desa fokus di Desa Empirang Ujung telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai dari Persiapan dan perencanaan, Pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi, pelaporan hasil pencapaian sampai dengan tahap pemantapan. Struktur birokrasi yang jelas membuat masyarakat Desa Empirang Ujung memahami dan merepon positif terhadap program desa fokus tersebut.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan kebijakan program desa fokus selanjutnya agar pemerintah Kabupaten Sanggau selaku implementor lebih konsisten dalam setiap penyelenggaraan program, sehingga dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program.
2. Agar pemerintah membentuk Tim khusus di luar SKPD yang terlibat untuk mengevaluasi kegiatan desa fokus yang sudah dilaksanakan sehingga lebih bersifat objektif dan dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan desa fokus di tahun berikutnya.
3. Untuk implementasi kebijakan program Desa Fokus selanjutnya, tugas dan fungsi personil yang terlibat dalam Tim Pelaksana lebih ditingkatkan, seperti melakukan bimbingan kepada para aparat pemerintah desa yang dijadikan lokasi desa fokus.

Diharapkan pemerintah desa bersama masyarakat dapat menjaga dan mengelola fasilitas yang telah dibangun seperti sarana MCK dan menerapkan kegiatan yang sudah diberikan seperti pelatihan administrasi desa, penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Kawasan Pembangunan Sejenis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Alfabeta.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dwijoyowijoto, Rianto N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Public Policy)*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islahy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kahlo, J. Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyeleksiannya)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press.
- Martun, B.N. 1988. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong tahun 2000*. Jakarta: PT Darma Aksara Perkasa, Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Tangerang: Nadi Pustaka.
- Ripley, J.B & Grace A Franklin. 1987. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Suharto, Ed. 2006. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Supriatna, Tjahjaja. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengantasan Kemiskinan*. Bandung: Alqaprint.
- Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

B. Dokumen Pemerintah

- Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa, 2012, *Daftar Desa Fokus*.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa, 2012, *Data Kegiatan SKPD di Desa Empirang Ujung*.
- Kantor Desa Empirang Ujung, 2013, *Profil Desa Empirang Ujung*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.
- Sanggau Dalam Angka.2012.
- Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penetapan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau Tahun 2010
- Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 235 Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau Tahun 2011.
- Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 557 Tahun 2011 Tentang Penetapan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2014
- Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 650 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 557 Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Fokus di Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2012-2014
- Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2012 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Koordinator 29 Desa Fokus di Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2012
- Penelitian Terdahulu**
- Saputo Eko Implementasi Program Bedah Desa Di Desa Dangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008.
- Selawati, Yandi. Efektifitas Pelaksanaan Program Membangun Dan Menjaga Desa / Kelurahan Atau *Mamangun Tunjag Mahaga Lewu* (PM2L) Di Kabupaten Pulang Pisau (Studi : Di Desa Lawang Ulu Kecamatan Banana Tinggang)
- Wanyuni, Nita Dwi. Pelaksanaan Program Desa Siaga Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka